

Evaluasi Kebijakan Profesi Guru Era Digital dalam Perspektif Administrasi Publik

Firda Nasrani Jawa Bara ¹

¹ Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa Surabaya

*Penulis Korespondensi: Firdarambun@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate policies regarding teacher professional development in the digital era through a public administration lens, addressing the gap between regulatory documents and operational realities on the ground. Employing a descriptive qualitative method based on a literature review, the analysis focuses on four key cycles: policy formulation, implementation governance, public impact, and evaluation. The findings indicate that the successful digital transformation of educators depends not merely on the provision of technology platforms, but on strengthening bureaucratic governance, aligning regulations, fostering inter-agency coordination, and ensuring equitable digital infrastructure in remote areas. Periodic evaluation serves as a critical instrument for streamlining teachers' administrative burdens and ensuring budgetary accountability. The study recommends governance strategies that are inclusive, adaptive, and transparent to sustain the quality of national education.*

Keywords: *Policy Evaluation, The Teaching Profession in the Digital Era, Public Administration*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan pengembangan profesi guru era digital melalui pendekatan administrasi publik untuk mengatasi kesenjangan antara dokumen regulasi dan realitas operasional di lapangan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, analisis difokuskan pada empat siklus utama: perumusan kebijakan, tata kelola implementasi, dampak publik, dan evaluasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital pendidik tidak hanya bertumpu pada penyediaan platform teknologi, melainkan pada penguatan tata kelola birokrasi, penyelarasan regulasi, koordinasi lintas lembaga, serta pemerataan infrastruktur digital di daerah terpencil. Evaluasi berkala menjadi instrumen kritis untuk menyederhanakan beban administrasi guru dan menjamin akuntabilitas anggaran. Penelitian ini merekomendasikan strategi tata kelola yang inklusif, adaptif, dan transparan demi keberlanjutan mutu pendidikan nasional.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Profesi Guru Era Digital, Administrasi Publik

1. LATAR BELAKANG

Pengembangan profesi guru merupakan instrumen strategis yang dirancang dan dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi profesional guru demi mendorong peningkatan mutu pembelajaran nasional. Di era transformasi digital yang bergerak eksponensial, dinamika pengembangan profesi guru tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kualifikasi formal, melainkan menuntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi terus berubah.¹ Guru diposisikan sebagai agen utama pembelajaran yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan proses

¹ Agus Sriyanta dan Ika Kartika, "Kemajuan digital dalam pembelajaran mengubah paradigma pendidikan," *Jurnal Tahsinia* 4, no. 2 (2023): 312–25.

pendidikan.² Menanggapi kebutuhan mendesak tersebut, pemerintah sebagai pemegang otoritas publik telah menerbitkan berbagai regulasi serta intervensi kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru secara modern.³ Namun efektivitas pencapaian sasaran kebijakan ini sangatlah bergantung bagaimana kerangka kebijakan tersebut dirumuskan, diorganisasikan dan diimplementasikan di lapangan. Sehingga tepat seperti yang dikatakan Lukmanul Hakim bahwa pentingnya penguatan profesi guru perlu senantiasa ditempatkan pada koridor kebijakan publik yang adaptif terhadap kemajuan teknologi.⁴

Peran strategis guru dalam sistem pendidikan mencakup sikap tanggung jawab yang tidak sebatas menyampaikan materi atau sekedar transfer pengetahuan. Namun, lebih dari itu, guru sebagai pendidik mengemban kewajiban moral dan profesional yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi pembentukan pengetahuan, keterampilan, serta nilai karakter siswa secara holistik dan komprehensif.⁵ Akses informasi tanpa batas dan pesatnya keterlibatan teknologi digital dalam ekosistem persekolahan menuntut guru untuk bertransformasi dari pengajar konvensional menjadi fasilitator pembelajaran yang berbasis digital. Sehingga dibutuhkan kesiapan mental dan keterampilan teknis pendidik dalam mengintegrasikan media digital secara efisien. Pembelajaran digital menjanjikan efisiensi dan jangkauan sumber belajar yang luas, namun keunggulan tersebut hanya dapat terwujud secara optimal apabila kapasitas serta profesionalisme guru berada pada tingkat yang memadai.⁶ Ketimpangan antara akselerasi teknologi dan kesiapan sumber daya manusia akan menciptakan celah efektivitas yang merugikan perkembangan belajar siswa. Adanya kebijakan kapasitas digital guru secara kontinu menjadi syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan demi menjaga mutu dan relevansi pendidikan nasional.⁷

² Sansan Ihsan Basyori, "PERANAN GURU SEBAGAI FASILITATOR DALAM DUNIA PENDIDIKAN MODERN.," *Syntax Idea* 7, no. 4 (2025): 331.

³ Eka Prihatin dan S Pd Sutangsa, *Transformasi Kebijakan Pendidikan: dari Konsep hingga Pelaksanaan di Era Digital* (Indonesia Emas Group, 2025).

⁴ Lukmanul Hakim, *Guru Profesional: Konsep, Strategi, dan Tantangan dalam Menghadapi Era Modern* (Penerbit Adab, 2024).

⁵ Robi'ah Robi'ah et al., "Peran Etika dan Tanggung Jawab Guru dalam Pembentukan Kepribadian Siswa di Era Pembelajaran 5.0.," *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 8, no. 2 (2025): 701–10.

⁶ Noerwanty Bilale, Nuramila Nuramila, dan Argariawan Tamsil, "Profesi kependidikan di era digital: Tantangan, peluang, dan strategi penguatan profesionalisme guru," *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan* 3, no. 3 (2026): 59–66.

⁷ Muhlis Fajar Wicaksana, *MAGANG PENDIDIKAN: Integrasi Kompetensi Pedagogik & Profesional di Era Digital* (UNU PASURUAN PRESS, 2022).

Menurut Moh dan Feni dalam penelitiannya menyatakan bahwa meskipun transformasi digital menjanjikan berbagai kemudahan, pelaksanaan kebijakan pengembangan profesi guru pada kenyataannya dihadapkan dengan berbagai tantangan teknis, struktural, dan budaya organisasi yang cukup kompleks.⁸ Dalam konteks era digital, para pendidik dipaksa untuk beradaptasi dengan perubahan paradigma pembelajaran yang sangat cepat serta adanya pergeseran tuntutan kualifikasi kerja.⁹ Secara operasional, guru di lapangan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendukung, keterbatasan akses internet, serta kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan digital. Hambatan-hambatan ini mengindikasikan bahwa ada kesenjangan (*gap*) yang cukup krusial antara ekspektasi ideal yang ada pada lembar dokumen kebijakan dengan realitas yang dihadapi guru di kelas. Jika hambatan ini dibiarkan tanpa adanya intervensi tata kelola yang terarah, maka regulasi pengembangan profesi guru di era digital berpotensi kehilangan daya jangkauan dan keberlanjutan.¹⁰ Permasalahan ini mempertegas bahwa keberhasilan program tidak hanya berpatokan pada ketersediaan platform digital, melainkan dari keterpaduan manajemen pelaksanaannya.

Evaluasi kebijakan menjadi instrumen yang kritis yang tidak hanya mengukur presentase ketercapaian target kuantitatif program, tetapi juga mengidentifikasi kelemahan dan hambatan operasional yang perlu diperbaiki. Dalam kerangka ini, perspektif administrasi publik menawarkan pijakan analitis yang relevan dengan efektivitas kebijakan pengembangan profesi guru di era digital.¹¹ Administrasi publik secara fundamental berfokus pada keseluruhan proses pengelolaan, dimulai dari formulasi regulasi, perencanaan anggaran, pengorganisasian sumber daya, pola koordinasi antarlembaga, hingga strategi implementasi dan pengontrolan kinerja.¹² Analisis administrasi publik memungkinkan peneliti menilai sejauh mana mekanisme tata kelola, akuntabilitas, transparansi, serta alokasi sumber daya yang disiapkan pemerintah untuk menopang kebutuhan aktual guru dalam menghadapi arus digitalisasi yang berkelanjutan.

⁸ Moh Mundzir dan Feni Laventia, "Transformasi administrasi pendidikan di era digital: Tantangan dan peluang," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi* 1, no. 1 (2025): 56–62.

⁹ Ulya Amelia, "Tantangan pembelajaran era society 5.0 dalam perspektif manajemen pendidikan," *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 68–82.

¹⁰ La Baba et al., *Guru di Persimpangan Zaman: Mengajar, Bertahan, dan Bertumbuh di Era AI* (CV Eureka Media Aksara, 2026).

¹¹ Desia Anggelia Sari et al., *Analisis Kebijakan Pendidikan Kontemporer: Pendekatan Kritis, Desentralisasi, dan Inovasi Kebijakan* (CV. Penerbit Ilmu Literasi dan Riset (Pilar), 2026).

¹² Ir Aris Sarjito, *Dasar-dasar administrasi publik* (Indonesia Emas Group, 2024).

Sekalipun kajian adopsi teknologi guru berkembang pesat, analisis sistematis dari perspektif tata kelola administrasi publik seperti struktur birokrasi, koordinasi kelembagaan, dan alokasi anggaran masih sangat terbatas. Kesenjangan ini menyebabkan rekomendasi perbaikan kebijakan yang bersifat parsial tanpa menyentuh akar permasalahan prosedur birokrasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian kerangka evaluasi kebijakan publik dan tata kelola digital untuk menilai keberlanjutan program secara keseluruhan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan profesi guru era digital melalui pendekatan administrasi publik. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi kajian tata kelola pendidikan serta masukan praktis untuk merumuskan strategi kebijakan yang adaptif, efisien, dan akuntabel.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (*literatur review*).¹³ Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan profesi guru era digital dari aspek administrasi publik. Sumber data diperoleh melalui artikel jurnal, buku, dan materi yang membahas mengenai tata kelola pendidikan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk membedah kesenjangan antara dokumen kebijakan dan realitas operasional.¹⁴ Penelitian ini menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan yang adaptif, transparan, dan akuntabel demi peningkatan mutu pendidikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan Kebijakan Pengembangan Profesi Guru Era Digital

Perumusan kebijakan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam siklus administrasi publik untuk merancang arah dan strategi peningkatan profesionalisme guru di era digital. Dalam konteks disrupsi teknologi, perumusan regulasi tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional, melainkan wajib berbasis pada faktual.¹⁵ Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu memetakan kebutuhan nyata dan kesenjangan literasi digital pendidik secara objektif di

¹³ Fitri Nurpita, Mely Cahyani, dan Luthfi Anshori Rahman, "Teknik penelitian kualitatif," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 12, no. 01 (2025): 180–91.

¹⁴ Mukhamad Fathoni, "Teknik analisis data," *Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda*, 2023, 1–15.

¹⁵ Bunga D Cahyani Sukardi, "Refleksi Masa Depan Filsafat Hukum Di Era Kecerdasan Buatan (Ai) Dan Teknologi Global," *Journal Social Politics and Humanities* 1, no. 3 (2025): 1–10.

lapangan.¹⁶ Proses ini menuntut identifikasi komprehensif mengenai tantangan pembelajaran modern, akses media pembelajaran digital, dan kesiapan mental guru. Sebab, tanpa adanya pemetaan kebutuhan yang akurat, regulasi yang muncul beresiko mengalami misorientasi dan gagal menjawab kebutuhan kontekstual siswa di kelas. Oleh karena itu, kerangka perumusan kebijakan profesi guru era digital harus diposisikan sebagai pedoman strategis yang adaptif, terukur dan responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi pendidikan.¹⁷

Upaya merumuskan kebijakan pengembangan profesi guru, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program strategis yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Regulasi nasional diarahkan untuk mendorong penguasaan teknologi melalui program unggulan seperti Guru penggerak, Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan pemanfaatan *Learning Management System* (LMS).¹⁸ Secara teoritis, perumusan program-program ini bertujuan untuk mengintegrasikan keterampilan teknologis, pedagogis, dan penguasaan materi (*TPAK*) dalam kerangka kerja profesional guru.¹⁹ Namun, dari sudut pandang administrasi publik, desain kebijakan tersebut harus dipastikan agar tidak sekedar berfokus pada digitalis dokumen formal atau pemenuhan administrasi belaka. Perumusan kebijakan harus mampu menciptakan mekanisme pembinaan berkelanjutan yang memberi ruang bagi guru untuk berinovasi.²⁰ Dengan merancang indikator keberhasilan yang terarah, perumusan kebijakan dapat menjadi pendorong utama transformasi sistematis dalam sistem pendidikan era digital.

Kualitas perumusan kebijakan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip partisipasi inklusif diterapkan dalam proses penyusunannya. Dalam perumusan kebijakan profesi guru digital, keterlibatan aktif dari berbagai pihak terkait seperti organisasi guru, akademisi perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan praktisi teknologi menjadi kunci

¹⁶ Saras Pratama et al., "Pentingnya literasi digital dalam dunia pendidikan: Transformasi pembelajaran di era digital," *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)* 6, no. 2 (2025): 554–61.

¹⁷ Rafiud Ilmudinulloh et al., *Memahami Perubahan dalam Dunia Pendidikan: Evolusi atau Revolusi* (PT. Literatus Digitus Indonesia, 2026).

¹⁸ Asty Raisha Agma, "Pemanfaatan Learning Management System (LMS) dalam pembelajaran PPG daring terintegrasi," *Jurnal Pendidikan Profesi Guru* 1, no. 1 (2025): 28–36.

¹⁹ Frisca Yuyun Padudung dan Rijanto Purbojo, "Pengaruh Tpack, Efikasi Diri, Dan Pengalaman Mengajar Terhadap Integrasi Teknologi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Katolik Dalam Jabatan," *EDUTECH* 24, no. 2 (2025): 716–31.

²⁰ Melyna Wijaya Putri et al., "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar: Antara Idealitas Konsep dan Realitas Lapangan di Berbagai Daerah Indonesia," *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 15, no. 2 (2025): 179–90.

utamanya.²¹ Administrasi publik yang demokratis menekankan pentingnya untuk memahami kebutuhan atau kendala yang dialami secara nyata oleh guru di daerah terpencil. Seringkali kebijakan yang dirumuskan secara terpusat mengalami kegagalan adopsi karena kurang memperhitungkan kondisi geografis dan ketersediaan infrastrukturnya.²² Melalui konsultasi publik yang luas, rumusan kebijakan dapat mengakomodasikan keragaman kondisi satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, dapat menjamin regulasi yang didapatkan tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga memiliki tingkat kelayakan operasional yang tinggi saat diimplementasikan oleh guru.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dimana tujuan dari UU ini menekankan pentingnya implementasi pengembangan profesi guru termasuk dalam beradaptasi dengan teknologi digital.²³ Dalam implementasi inilah kebijakan yang telah dirumuskan akan diwujudkan dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya tentu melibatkan beberapa pihak seperti :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memiliki peran utama dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pengembangan profesi guru di era digital serta memiliki tanggung jawab dalam mendukung peningkatan kompetensi guru.
2. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Guru (PPG) yang berperan untuk membantu meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan termasuk dalam konteks digital.
3. Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (PTKIP) yang berperan dalam mengembangkan kurikulum yang selaras dengan era digital serta pengembangan guru yang berkualitas.
4. Pemerintah Daerah yang berperan dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah pusat tentang profesi guru. Termasuk juga dalam

²¹ Musytari Randa dan Muhammad Yusuf, "Strategi Kepemimpinan Dan Manajemen Pendidikan Inovatif Dalam Mendorong Kinerja Guru Sekolah Berkelanjutan Di Indonesia," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2025): 203–11.

²² Yosalli Yosalli et al., *Pengantar Kebijakan Dan Sistem Kesehatan: Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

²³ Sholikhah Sholikhah, "Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis)," *Akademika* 11, no. 01 (2017).

menata dan pemerataan guru-guru di wilayah baik di perkotaan maupun di pedesaan.

5. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Guru (LPMP) yang berperan menyelenggarakan pelatihan berbasis teknologi dalam upaya meningkatkan kompetensi guru.
6. Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab dalam memberikan atau mendukung pendanaan kegiatan pengembangan profesi guru di era digital.
7. Pengawas sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru bertanggung jawab dalam mengawasi, memfasilitasi, dan ikut membimbing pengembangan profesi guru di era digital di Tingkat sekolah.

Tugas perumusan kebijakan dalam aspek administrasi publik berupaya untuk menyelaraskan pasal-pasal undang-undang tersebut dengan peraturan turunan yang lebih teknis dan fleksibel. Penyelarasan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga pembuat kebijakan di tingkat pusat dengan eksekutor di tingkat daerah. Kerangka hukum yang jelas dapat memberikan kepastian hukum serta arah yang terukur bagi seluruh instansi birokrasi dalam mengalokasikan sumber daya guna mendukung pengembangan kapasitas digital guru.

Tata Kelola Implementasi Kebijakan dan Kelembagaan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial di mana rancangan aturan diubah menjadi tindakan nyata melalui pengorganisasian sumber daya publik.²⁴ Dalam kerangka pengembangan profesi guru era digital, implementasi yang efektif tidak hanya bergantung pada penerbitan surat keputusan atau sosialisasi juknis, tetapi juga pada penyediaan daya dukung operasional. Administrasi publik bertanggung jawab memastikan bahwa fasilitas utama seperti ketersediaan akses internet, penyediaan komputer, serta akses terhadap platform digital terdistribusi secara merata.²⁵ Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai di sekolah merupakan syarat mutlak agar program pelatihan digital tidak berhenti sebagai wacana teoritis saja. Tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang nyata, guru akan mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan

²⁴ Sulton Muminah dan Tjahjo Suprajogo, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Bottom-Up," *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 8, no. 4 (2025): 1485–95.

²⁵ Noval Hardiyanto, Muhammad Noor, dan Anwar Alaydrus, "Efektivitas Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara," *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (2026): 339–44.

keterampilan digital yang telah dipelajari dalam proses mengajar sehari-hari. Oleh karena itu, efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan birokrasi dalam proses penyediaan fasilitas secara tepat waktu.²⁶

Keberhasilan implementasi kebijakan profesi guru di era digital sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan berbagai pihak seperti Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Balai Guru Penggerak (BGP), Dinas Pendidikan Daerah, hingga kepala sekolah dan pengawas.²⁷ Dari perspektif administrasi publik, tantangan terbesar dalam tata kelola ini adalah menghindari ego sektoral dan hambatan komunikasi birokrasi. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam melakukan redistribusi dan penataan guru agar pembinaan digital tidak hanya fokus di wilayah perkotaan.²⁸ Sementara itu, kementerian keuangan dan dinas terkait harus menjamin kelancaran alokasi dana tepat waktu dan tepat sasaran.²⁹ Pembagian peran yang tepat dan kejelasan alur koordinasi antarlembaga akan mencegah terjadinya duplikasi kegiatan dan penundaan program, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

Pelaksanaan program pelatihan guru era digital harus dirancang secara berkelanjutan dan bertahap, bukan sekadar kegiatan formalitas berjangka pendek.³⁰ Pengembangan profesionalisme yang berdampak nyata membutuhkan modul pelatihan yang disesuaikan dengan tingkat literasi digital awal para pendidik.³¹ Melalui pendekatan pelatihan yang fleksibel, guru diberikan ruang kreativitas untuk memilih dan menerapkan media yang sesuai dengan karakteristik siswa di kelasnya. Pendampingan yang berkala

²⁶ Debyella Cesia Liklikwatil, Petronela Sahetapy, dan Normawati Normawati, "Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Perspektif Kinerja Pelayanan Publik: Studi di Kabupaten Maluku Tengah," *Takwana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 4, no. 4 (2026): 1833–42.

²⁷ Rustiyana Rustiyana, "Evaluasi Kebijakan "Kurikulum Merdeka" dari Perspektif Tata Kelola Pemerintahan: Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dalam Pendampingan Sekolah Dasar," *Kinanti: Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih* 4, no. 1 (2026): 650–64.

²⁸ Samhaji Samhaji dan Francesco Dennis Anggara, "Analisis implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan pada daerah tertinggal Indonesia," *Journal of Governance and Policy Innovation* 5, no. 2 (2025): 99–112.

²⁹ Abd Gafur, "Implementasi kebijakan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA satuan kerja kementerian negara/lembaga," *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 2, no. 16 (2023): 1–12.

³⁰ Sri Nurhayati et al., *Paradigma baru dalam pendidikan abad 21* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2025).

³¹ Nurmida Catherine Sitompul et al., "Pelatihan Peningkatan Keterampilan Guru SMA dalam Mengembangkan Powerpoint Interaktif dengan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)," *Abdimas Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2024): 107–15.

setelah pelatihan menjadi aspek yang penting dalam tata kelola pelaksanaan.³² Langkah ini memastikan bahwa materi yang diperoleh dari program pelatihan bisa ditindaklanjuti di dalam praktik pembelajaran di sekolah.

Prinsip utama dalam administrasi publik adalah keadilan sosial dan kesetaraan pelayanan bagi seluruh warga Indonesia. Dalam konteks kebijakan profesi guru, pemerintah memiliki kewajiban moral dan konstitusional yang memastikan bahwa seluruh pendidik memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri.³³ Pada kenyataannya, implementasi kebijakan era digital masih kerap dibayang-bayangi oleh kesenjangan digital yang tajam antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Guru di wilayah pedesaan sering kali tertinggal dalam mengakses platform pelatihan daring akibat keterbatasan sinyal dan sarana.³⁴ Tata kelola birokrasi publik harus mampu menghadirkan solusi yang afirmatif seperti penyediaan moda pembelajaran khusus daerah terpencil. Dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang merata ke seluruh wilayah, keadilan dapat terwujud, sehingga tidak ada guru yang terisolasi dari arus transformasi pendidikan digital.³⁵

Dampak Tata Kelola Publik dalam Pengembangan Profesi Guru

Dampak utama yang terjadi dari penerapan tata kelola yang efektif adalah terciptanya transformasi kapasitas kelembagaan di sektor pendidikan. Tata kelola publik yang modern dapat mendorong terjadinya modernisasi struktur birokrasi, dari yang awalnya kaku dapat lebih fleksibel serta responsif terhadap perubahan era digital.³⁶ Pengelolaan program yang terintegrasi secara digital mampu memangkas alur koordinasi yang panjang antara kementerian pusat, dinas pendidikan daerah, dan satuan pendidikan. Dampak positif dari perbaikan tata kelola ini terlihat pada peningkatan efisiensi operasional dan kecepatan distribusi informasi mengenai program pengembangan

³² Paroli Paroli dan Suca Rusdian, "Transformasi Tata Kelola Pesantren Melalui Perencanaan SDM Strategis: Program Pendampingan di Al-Ilham Islamic Boarding School," *Celebes Journal of Community Services* 4, no. 1 (2025): 163–73.

³³ Tumewa Pangaribuan et al., "Membangun Integritas dalam Profesi Pendidik: Etika, Tanggung Jawab, dan Akuntabilitas," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 25, no. 1 (2025): 583–90.

³⁴ Desvanada Bilha Zahrah, "Tantangan Komunikasi Pada Pembelajaran Daring Di Wilayah Pedesaan Terpencil," *Gandiwa Jurnal Komunikasi* 5, no. 2 (2025): 45–51.

³⁵ Ihsan Iskandar et al., *TRANSFORMASI PENDIDIKAN DI ERA KECERDASAN ARTIFISIAL* (Goresan Pena, 2026).

³⁶ Thasman Thasman et al., "Transformasi Birokrasi melalui Inovasi Pelayanan Publik: Kajian Literatur tentang Reformasi dan Akuntabilitas Pemerintahan," *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal* 5, no. 1 (2025): 37–52.

kompetensi guru.³⁷ Ketika tata kelola kelembagaan berjalan dengan lancar, penyampaian pelayanan publik kepada para pendidik dapat dilakukan secara tepat waktu.

Tata kelola yang baik memberikan dampak langsung pada efisiensi dan transparansi pengelolaan alokasi anggaran negara. Melalui penerapan prinsip akuntabilitas dalam penganggaran publik, setiap alokasi dana APBN dan APBD untuk digiliasi guru dapat ditargetkan secara lebih optimal.³⁸ Pengelolaan anggaran yang terencana dan terawasi mencegah terjadinya pemborosan dana pada kegiatan formalitas yang kurang berdampak langsung pada guru. Dampaknya, pemanfaatan sumber daya keuangan publik menjadi lebih fokus pada penyediaan sarana teknologi mendasar, subsidi akses internet, dan penyelenggaraan pelatihan berkualitas di daerah yang membutuhkannya.³⁹ Tata kelola yang terencana tidak hanya meningkatkan rasio keberhasilan program, melainkan juga memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memajukan profesi guru di era digital.

Di sisi lain, kualitas tata kelola publik menentukan sejauh mana hambatan birokrasi di tingkat lapangan dapat diminimalkan. Dampak dari tata kelola yang belum sepenuhnya terlaksana seringkali menciptakan beban administrasi yang dapat menyita waktu produktif guru.⁴⁰ Kewajiban menginput data pada berbagai aplikasi pelaporan birokrasi seringkali mengalihkan fokus utama pendidik dari aktivitas mengajar di kelas. Selain itu, ketimpangan tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah berpotensi memperlebat kesenjangan implementasi layanan pendidikan di daerah terpencil. Oleh karena itu, dampak tata kelola publik diharapkan adalah terwujudnya tata kelola yang mampu menyederhanakan prosedur administrasi.⁴¹ Penyederhaan ini berdampak pada terwujudnya kemandirian profesional guru serta pemerataan akses pembinaan tanpa terkendala.

³⁷ Wahyu Widodo, Muh Hanif, dan Novan Ardy Wiyani, "Kepemimpinan Demokratis-Transformasional dan Manajemen Adaptif dalam Memperkuat Kinerja Guru di Era Digital," *Media Manajemen Pendidikan* 9, no. 1 (2026): 190–206.

³⁸ Savira Rahmadhea, "Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah," *Journal Manajemen Pendidikan* 1, no. 01 (2025): 43–55.

³⁹ Andryan Muhammad Rizky et al., "E-Government: Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 2070–89.

⁴⁰ Chesia Chaerany, "Literature review pengaruh kelengkapan administrasi pembelajaran terhadap kinerja guru di madrasah," *Journal Education and Government Wiyata* 2, no. 4 (2024): 381–95.

⁴¹ Zainal Fadri dan S Fil, "Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik," *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital* 61 (2024): 61–62.

Dampak jangka panjang dari tata kelola publik adalah terjaminnya keberlanjutan program serta perwujudan keadilan sosial dalam ekosistem pendidikan di Indonesia.⁴² Tata kelola yang berlandaskan komitmen politik yang kuat mampu menjaga konsistensi kebijakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan birokrasi. Dampak positifnya, para pendidik mendapatkan arah pembinaan karier dan perlindungan profesional secara merata di era disrupsi. Selain itu, tata kelola publik yang berkeadilan mampu mengatasi kesenjangan digital dengan memberikan intervensi afirmatif bagi guru-guru di daerah terpencil.⁴³ Ketika seluruh pendidik di seluruh wilayah memiliki kesempatan yang seimbang untuk meningkatkan kapasitas diri, mutu pembelajaran di sekolah akan meningkat secara merata. Tata kelola publik pada akhirnya memberikan dampak tranformatif untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang berdaya saing tinggi dan berkeadilan.

Evaluasi Kebijakan Pengembangan Profesi Guru di Era Digital

Evaluasi kebijakan pada hakekatnya merupakan proses analisis dan penilaian yang terstruktur untuk mengukur efektivitas, efesiensi, serta dampak nyata dari program publik yang telah dilaksanakan.⁴⁴ Dalam konteks pendidikan, evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menelaah kaitan antara perencanaan, tata kelola implementasi, dan ketersediaan sarana pendukung. Seiring kemajuan disrupsi teknologi, kebijakan pengembangan profesi guru tidak lagi di kelola secara pasif. Evaluasi yang efektif membutuhkan keaktifan, pendekatan berbasis data, serta keselarasan dengan kondisi objektif di tingkat daerah.⁴⁵ Melalui evaluasi yang komprehensif, pemerintah dapat memetakan bagian mana yang regulasi yang telah berjalan optimal dan bagian mana yang memerlukan perbaikan. Hal ini agar kebijakan publik yang dirumuskan mampu merespon tuntutan zaman serta menjaga relevansi kompetensi pendidik di tengah perubahan ekosistem pendidikan digital.

⁴² Dewi Maisyafarotul Amelia, "Pengaruh kebijakan publik terhadap keadilan sosial berbasis komunitas," *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025): 15–23.

⁴³ Cita Putri Calista et al., "Kesenjangan pendidikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan: analisis kebijakan dan praktik di indonesia," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 03 Juni (2025): 3965–78.

⁴⁴ Muhammad Taali, Arif Darmawan, dan Ayun Maduwinarti, *Teori dan model evaluasi kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁴⁵ Nisrina Luthfiya Azam dan Mutammam Mutammam, "Pengembangan Fungsi Evaluasi Dalam Manajemen Pendidikan Untuk Mewujudkan Sekolah Menengah Pertama Yang Berkualitas," *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 4, no. 3 (2026): 1058–73.

Evaluasi terhadap kebijakan profesi guru menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan serta kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Sebagus apapun perencanaan dan fasilitas yang disediakan oleh manajemen institusi, hasilnya tidak akan optimal tanpa didukung oleh guru yang adaptif dan kompeten. Kemampuan memanfaatkan perangkat teknologi harus lahir dari kesadaran internal bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan primer dalam proses pembelajaran.⁴⁶ Oleh karena itu, skema pelatihan berbasis teknologi perlu diperluas mencakup penguasaan platform digital, penyusunan materi ajar interaktif, dan penerapan pembelajaran kolaboratif.⁴⁷ Selain pelatihan formal, efektivitas pengembangan guru juga dipengaruhi oleh ruang kolaborasi seperti *workshop* dan forum antar pendidik.⁴⁸ Penguasaan sarana teknologi seperti proyektor, laptop, dan media presentasi inovatif terbukti mampu memicu daya kritis serta mendorong partisipasi aktif siswa di kelas.

Dalam menghadapi era digital, guru sebagai pendidik dituntut untuk secara proaktif memanfaatkannya sebagai peluang emas dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Pemanfaatan teknologi informasi pada dasarnya hadir untuk mempermudah penyelesaian tugas pedagogis dan administrasi pendidik di sekolah.⁴⁹ Integrasi media digital memberi ruang yang luas bagi guru untuk merancang modul ajar yang bervariasi, kontekstual, serta relevan dengan kebutuhan siswa. Namun dari perspektif evaluasi publik, kemudahan ini hanya dapat diraskan secara merata jika hambatan teknis seperti kesenjangan jaringan internet dan keterbatasan sarana dapat diatasi oleh pemerintah. Pelatihan berkelanjutan menjadi sarana penting agar guru tidak merasa terbebani dengan kemajuan teknologi, melainkan mampu menggunakannya secara kreatif dalam proses pembelajaran.⁵⁰

⁴⁶ Helena Anggraeni, "Penguatan blended learning berbasis literasi digital dalam menghadapi era revolusi industri 4.0," *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 190–203.

⁴⁷ Hanifa Intan Desiga dan Khoerotun Nisa Liswati, "Guru hebat di era digital: Menelusuri jejak pengembangan kompetensi melalui studi literatur," *J-Symbol: Jurnal Magister Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 13, no. 2 (2025): 850–58.

⁴⁸ Abdul Muis et al., "Model Pelatihan Edutech Berbasis Komunitas dalam Meningkatkan Kompetensi Guru dan Interaktivitas Pembelajaran di Sekolah," *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)* 5, no. 1 (2026): 94–108.

⁴⁹ Lailatul Aminah, Isma Sholikhatul Alfain, dan Sugeng Listyo Prabowo, "Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah: Peran Literasi Digital Guru dalam Efisiensi Administrasi," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 5936–51.

⁵⁰ Reza Valevi et al., "Kebijakan Pelatihan Guru Pendidikan Berbasis Teknologi," *Mesada: Journal of Innovative Research* 2, no. 2 (2025): 1485–92.

Dilihat dari perspektif administrasi publik, evaluasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian, melainkan mencakup siklus pengumpulan data, analisis mendalam, pelaporan, dan pengambilan keputusan perbaikan.⁵¹ Administrasi publik bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan regulasi di lapangan. Birokrasi pendidikan harus memantau kendala yang dihadapi oleh guru serta mengukur sejauh mana intervensi teknologi berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran. Oleh sebab itu, hasil evaluasi harus dilaksanakan sebagai umpan balik untuk menyempurnakan formulasi regulasi di masa yang akan datang. Akuntabilitas dan komitmen administrasi publik dalam tahap evaluasi ini menjadi penentu utama terwujudnya tata kelola pengembangan profesi guru yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengembangan profesi guru era digital dalam perspektif administrasi publik menegaskan bahwa keberhasilan transformasi pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan penerbitan regulasi atau penyediaan platform teknologi saja. Diperlukan tata kelola yang terintegrasi pada setiap tahapan kebijakan, dimulai dari perumusan yang berbasis data dan inklusif, implementasi yang ditopang oleh koordinasi lintas lembaga serta pemerataan infrastruktur, hingga evaluasi yang akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat pengawasan berkelanjutan dan memanfaatkan hasil evaluasi sebagai umpan balik untuk merumuskan strategi pembinaan guru yang adaptif, berkeadilan, dan berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran secara nasional.

4. KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan pengembangan profesi guru era digital dalam perspektif administrasi publik menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi pendidikan membutuhkan penguatan dari seluruh siklus kebijakan. Pada perumusan, regulasi harus bersifat inklusif, adanya bukti faktual, serta menyelaraskan regulasi nasional dengan kebutuhan kontekstual di lapangan. Dalam implementasi, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antarlembaga, kejelasan pembagian peran birokrasi, penyediaan fasilitas teknologi yang merata, serta penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan kepada guru sebagai pendidik. Dengan demikian, perbaikan tata kelola

⁵¹ Abdul Rahman Dilapanga, Margareth Inof Riisyie Rantung, dan M A P SH, *Monitoring & evaluasi kebijakan publik* (Deepublish, 2022).

birokrasi menjadi syarat mendasar untuk mewujudkan sistem pelayanan pendidikan yang responsif dan adaptif.

Proses evaluasi kebijakan berperan sebagai instrumen pengawasan berkelanjutan untuk mengukur efektivitas program, akuntabilitas anggaran, dan dampak nyata terhadap kompetensi digital guru. Hasil evaluasi memberikan data yang objektif untuk meneliti kesenjangan implementasi serta beban administrasi yang dialami pendidik di sekolah. Temuan evaluasi ini sangat penting dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk memformalisasi ulang regulasi yang lebih baik dan berkeadilan sosial. Pemerintah bersama dinas pendidikan daerah mengatasi ketimpangan infrastruktur digital, terutama bagi guru yang berada di daerah terpencil. Melalui komitmen politik yang konsisten dan sinergi tata kelola yang terintegrasi, pengembangan profesi guru dapat berjalan secara berkelanjutan guna meningkatkan mutu pembelajaran secara nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Agma, Asty Raisha. "Pemanfaatan Learning Management System (LMS) dalam pembelajaran PPG daring terintegrasi." *Jurnal Pendidikan Profesi Guru* 1, no. 1 (2025): 28–36.
- Amelia, Dewi Maisyafarotul. "Pengaruh kebijakan publik terhadap keadilan sosial berbasis komunitas." *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025): 15–23.
- Amelia, Ulya. "Tantangan pembelajaran era society 5.0 dalam perspektif manajemen pendidikan." *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 68–82.
- Aminah, Lailatul, Isma Sholikhatul Alfain, dan Sugeng Listyo Prabowo. "Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah: Peran Literasi Digital Guru dalam Efisiensi Administrasi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 5936–51.
- Anggraeni, Helena. "Penguatan blended learning berbasis literasi digital dalam menghadapi era revolusi industri 4.0." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 190–203.
- Azam, Nisrina Luthfiya, dan Mutammam Mutammam. "Pengembangan Fungsi Evaluasi Dalam Manajemen Pendidikan Untuk Mewujudkan Sekolah Menengah Pertama Yang Berkualitas." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 4, no. 3 (2026): 1058–73.
- Baba, La, L Syahrir, Firman Firman, dan Suardi Zain. *Guru di Persimpangan Zaman: Mengajar, Bertahan, dan Bertumbuh di Era AI*. CV Eureka Media Aksara, 2026.
- Basyori, Sansan Ihsan. "PERANAN GURU SEBAGAI FASILITATOR DALAM DUNIA PENDIDIKAN MODERN." *Syntax Idea* 7, no. 4 (2025): 331.
- Bilale, Noerwanty, Nuramila Nuramila, dan Argariawan Tamsil. "Profesi kependidikan di era digital: Tantangan, peluang, dan strategi penguatan profesionalisme guru." *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan* 3, no. 3 (2026): 59–66.
- Calista, Cita Putri, Firzan Achriansyah Izazi Putra, Felliza Maulita, Mahirah Zahra, dan Nasywa Aurellia Syakirah. "Kesenjangan pendidikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan: analisis kebijakan dan praktik di indonesia." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 03 Juni (2025): 3965–78.
- Chaerany, Chesia. "Literature review pengaruh kelengkapan administrasi pembelajaran terhadap kinerja guru di madrasah." *Journal Education and Government Wiyata* 2, no. 4 (2024): 381–95.
- Desiga, Hanifa Intan, dan Khoerotun Nisa Liswati. "Guru hebat di era digital: Menelusuri jejak pengembangan kompetensi melalui studi literatur." *J-Simbol: Jurnal Magister Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 13, no. 2 (2025): 850–58.
- Dilapanga, Abdul Rahman, Margareth Inof Riisyie Rantung, dan M A P SH. *Monitoring & evaluasi kebijakan publik*. Deepublish, 2022.

- Fadri, Zainal, dan S Fil. "Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik." *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital* 61 (2024): 61–62.
- Fathoni, Mukhamad. "Teknik analisis data." *Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda*, 2023, 1–15.
- Gafur, Abd. "Implementasi kebijakan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA satuan kerja kementerian negara/lembaga." *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 2, no. 16 (2023): 1–12.
- Hakim, Lukmanul. *Guru Profesional: Konsep, Strategi, dan Tantangan dalam Menghadapi Era Modern*. Penerbit Adab, 2024.
- Hardiyanto, Noval, Muhammad Noor, dan Anwar Alaydrus. "Efektivitas Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (2026): 339–44.
- Ilmudinulloh, Rafiud, Ihwan Ridwan, S E Sumaizar, Koko Adya Winata, dan I Ketut Suardika. *Memahami Perubahan dalam Dunia Pendidikan: Evolusi atau Revolusi*. PT. Literatus Digitus Indonesia, 2026.
- Iskandar, Ihsan, Daulat Marulitua Tambunan SE, M Min, M Th, D Min, dan Aleksy Bagoes. *TRANSFORMASI PENDIDIKAN DI ERA KECERDASAN ARTIFISIAL*. Goresan Pena, 2026.
- Liklikwatil, Debyella Cesia, Petronela Sahetapy, dan Normawati Normawati. "Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Perspektif Kinerja Pelayanan Publik: Studi di Kabupaten Maluku Tengah." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 4, no. 4 (2026): 1833–42.
- Muis, Abdul, Rahimul Harahap, Rinaldy Alidin, Putri Athirah Thaibur, dan Abwabul Jinan. "Model Pelatihan Edutech Berbasis Komunitas dalam Meningkatkan Kompetensi Guru dan Interaktivitas Pembelajaran di Sekolah." *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)* 5, no. 1 (2026): 94–108.
- Muminah, Sulton, dan Tjahjo Suprajogo. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Bottom-Up." *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 8, no. 4 (2025): 1485–95.
- Mundzir, Moh, dan Feni Laventia. "Transformasi administrasi pendidikan di era digital: Tantangan dan peluang." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi* 1, no. 1 (2025): 56–62.
- Nurhayati, Sri, Dian Septikasari, Loso Judijanto, Dwi Susanto, Sudadi Sudadi, Rusma Setiyana, Ayu Gede Willdahlia, Akhmad Ramli, dan Zamroni Zamroni. *Paradigma baru dalam pendidikan abad 21*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2025.
- Nurpita, Fitri, Mely Cahyani, dan Luthfi Anshori Rahman. "Teknik penelitian kualitatif." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 12, no. 01 (2025): 180–91.
- Padudung, Frisca Yuyun, dan Rijanto Purbojo. "Pengaruh Tpack, Efikasi Diri, Dan Pengalaman Mengajar Terhadap Integrasi Teknologi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Katolik Dalam Jabatan." *EDUTECH* 24, no. 2 (2025): 716–31.
- Pangaribuan, Tumewa, Sri Indriani Harianja, Intan Nurjannah, Fitri Rahayani, dan Adhwa Nurhaliza. "Membangun Integritas dalam Profesi Pendidik: Etika, Tanggung Jawab, dan Akuntabilitas." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 25, no. 1 (2025): 583–90.
- Paroli, Paroli, dan Suca Rusdian. "Transformasi Tata Kelola Pesantren Melalui Perencanaan SDM Strategis: Program Pendampingan di Al-Ilham Islamic Boarding School." *Celebes Journal of Community Services* 4, no. 1 (2025): 163–73.
- Pratama, Saras, Muhammad Ashari, Selly Annisa Binti Zulkarnain, dan Elsa Sabrina. "Pentingnya literasi digital dalam dunia pendidikan: Transformasi pembelajaran di era digital." *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)* 6, no. 2 (2025): 554–61.
- Prihatin, Eka, dan S Pd Sutangsa. *Transformasi Kebijakan Pendidikan: dari Konsep hingga Pelaksanaan di Era Digital*. Indonesia Emas Group, 2025.
- Putri, Melyna Wijaya, Reyhana Nur Azizah, Ulyantika Sofianisa, Amirudin Amirudin, dan Tin Amalia Fitri. "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar: Antara Idealitas Konsep dan Realitas Lapangan di Berbagai Daerah Indonesia." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 15, no. 2 (2025): 179–90.
- Rahmadhea, Savira. "Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah." *Journal Manajemen Pendidikan* 1, no. 01 (2025): 43–55.
- Randa, Musytari, dan Muhammad Yusuf. "Strategi Kepemimpinan Dan Manajemen Pendidikan Inovatif Dalam Mendorong Kinerja Guru Sekolah Berkelanjutan Di Indonesia." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2025): 203–11.

- Rizky, Andryan Muhammad, Melita Putri Pratiwi, Alike Chairunnisa, Iftitah Azzahra Aiko, dan Andre Ariesmansyah. "E-Government: Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 2070–89.
- Robi'ah, Robi'ah, Desri Ulfa, Amiddana Silfia, Safira Aulia Putri, dan Nabila Nabila. "Peran Etika dan Tanggung Jawab Guru dalam Pembentukan Kepribadian Siswa di Era Pembelajaran 5.0." *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 8, no. 2 (2025): 701–10.
- Rustiyana, Rustiyana. "Evaluasi Kebijakan" Kurikulum Merdeka" dari Perspektif Tata Kelola Pemerintahan: Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dalam Pendampingan Sekolah Dasar." *Kinanti: Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih* 4, no. 1 (2026): 650–64.
- Samhaji, Samhaji, dan Francesco Dennis Anggara. "Analisis implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan pada daerah tertinggal Indonesia." *Journal of Governance and Policy Innovation* 5, no. 2 (2025): 99–112.
- Sari, Desia Anggelia, Rr Febby Pudjian Ilianti, Alma Dita Mia Narfais, Widiasih Yogasara, Inge Pudjiastuti Adywibowo, Emi Tiningsih, Mochamad Nursalim, dan Wiwin Yulianingsih. *Analisis Kebijakan Pendidikan Kontemporer: Pendekatan Kritis, Desentralisasi, dan Inovasi Kebijakan*. CV. Penerbit Ilmu Literasi dan Riset (Pilar), 2026.
- Sarjito, Ir Aris. *Dasar-dasar administrasi publik*. Indonesia Emas Group, 2024.
- Sholikah, Sholikah. "Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis)." *Akademika* 11, no. 01 (2017).
- Sitompul, Nurmida Catherine, Achmad Noor Fatirul, Andri Kurniawan, dan Siti Mutmainah. "Pelatihan Peningkatan Keterampilan Guru SMA dalam Mengembangkan Powerpoint Interaktif dengan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)." *Abdimas Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2024): 107–15.
- Sriyanta, Agus, dan Ika Kartika. "Kemajuan digital dalam pembelajaran mengubah paradigma pendidikan." *Jurnal Tahsinia* 4, no. 2 (2023): 312–25.
- Sukardi, Bunga D Cahyani. "Refleksi Masa Depan Filsafat Hukum Di Era Kecerdasan Buatan (Ai) Dan Teknologi Global." *Journal Social Politics and Humanities* 1, no. 3 (2025): 1–10.
- Taali, Muhammad, Arif Darmawan, dan Ayun Maduwinarti. *Teori dan model evaluasi kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Thasman, Thasman, Maudhy Satyadharma, Neni Susanti, dan Hado Hado. "Transformasi Birokrasi melalui Inovasi Pelayanan Publik: Kajian Literatur tentang Reformasi dan Akuntabilitas Pemerintahan." *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal* 5, no. 1 (2025): 37–52.
- Valevi, Reza, Juliani Juliani, Pranata Seju Surbakti, dan M Wahyu Rizki Ardana. "Kebijakan Pelatihan Guru Pendidikan Berbasis Teknologi." *Mesada: Journal of Innovative Research* 2, no. 2 (2025): 1485–92.
- Wicaksana, Muhlis Fajar. *MAGANG PENDIDIKAN: Integrasi Kompetensi Pedagogik & Profesional di Era Digital*. UNU PASURUAN PRESS, 2022.
- Widodo, Wahyu, Muh Hanif, dan Novan Ardy Wiyani. "Kepemimpinan Demokratis-Transformasional dan Manajemen Adaptif dalam Memperkuat Kinerja Guru di Era Digital." *Media Manajemen Pendidikan* 9, no. 1 (2026): 190–206.
- Yosalli, Yosalli, Maretalinia Maretalinia, Friska Eka Fitria, Nailul Hikmi, dan Adisti Qamahadlina Larasati. *Pengantar Kebijakan Dan Sistem Kesehatan: Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.
- Zahrah, Desvanada Bilha. "Tantangan Komunikasi Pada Pembelajaran Daring Di Wilayah Pedesaan Terpencil." *Gandiwa Jurnal Komunikasi* 5, no. 2 (2025): 45–51.